

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan internasional mengacu pada interaksi antara negara dan aktor non-negara dalam skala global. Ini mencakup berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Dalam hubungan internasional, setiap negara menciptakan hubungan dengan negara lain. Dalam interaksi tersebut pasti terdapat kepentingan nasional yang tidak dapat dipisahkan dari politik luar negeri masing-masing negara yang diputuskan dengan melihat berbagai faktor. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri dapat mempengaruhi hubungan atau interaksi negara dengan negara lain.

Negara adalah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok orang atau orang yang disebut bangsa. Tugas utama negara adalah melindungi hak-hak warganya dan menjaga keutuhan wilayahnya. Hal ini dikatakan karena berdasarkan Konvensi Montevideo tahun 1933 syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu negara sebagai subjek hukum internasional adalah adanya penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintahan dan kemampuan untuk memelihara hubungan internasional.

Dalam menjalankan perannya, negara terkadang menghadapi konflik internal antara pemerintah dan aktor anti-pemerintah atau konflik eksternal antara satu negara dengan negara lainnya. Secara etimologi, konflik berasal dari kata latin yaitu “con” yang artinya bersama sedangkan “figere” artinya memukul. Dimana

perbedaan tersebut bisa menjadi awal mulanya terjadi sebuah konflik sosial ketika sistem sosial masyarakatnya tidak bisa mengatasi serta mengkondusifkan perbedaan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.

Dengan munculnya sebuah konflik antara dua kelompok atau lebih dapat menimbulkan perang besar bagi kedua belah pihak yang sedang bermasalah, dimana yang berawal dari masalah kecil dapat menjadi masalah besar bahkan melibatkan kekuatan negara untuk kepentingan negara sendiri baik dalam kegiatan fisik dan non fisik, yang dalam arti sempit adalah kondisi permusuhan, menggunakan kekerasan untuk melakukan dominasi terhadap dua atau lebih kelompok masyarakat di zona konflik. Dari adanya perang, kita belajar tentang situasi hukum di mana dua atau lebih kelompok orang yang sederajat menurut hukum internasional dapat terlibat dalam konflik bersenjata. Hal ini sesuai dengan apa yang dikembangkan Oppenheim, sebagaimana dikutip Djatikoesoemo dalam bukunya (1956:1): "Perang adalah perjuangan antara dua negara atau lebih dengan angkatan bersenjata, dengan tujuan saling mengalahkan dan mewujudkan kondisi perdamaian yang diinginkan dari pemenang."

Terjadinya perang biasanya karena perbedaan ideologis, keinginan untuk memperluas wilayah, perbedaan kepentingan, dan perebutan wilayah yang diperebutkan oleh kedua belah pihak atau kelompok. Seperti yang terjadi pada Perang Dingin, dimana setelah berakhirnya Perang Dingin, setiap negara tidak melupakan pentingnya menggunakan kekuatan, baik melalui kekuatan militer maupun dengan menyebarkan pengaruhnya ke negara lain. Di akhir Perang Dingin, ketika muncul dua negara adidaya antara blok Barat (Amerika Serikat) yang

berideologi liberalisme dan blok Timur (Uni Soviet) yang berideologi komunis, maka lahirlah strategi militer baru. Selama Perang Dingin, negara-negara menggunakan metode perang yaitu metode proxy war, di mana perang tersebut secara tidak langsung menimbulkan konflik dengan pihak ketiga dan mempengaruhi hasil strategi negara tersebut. Perang yang langsung berbenturan dengan penggunaan kekuatan militer yang menimbulkan rasa tidak aman di dunia saat itu, karena berdampak pada negara lain.

Metode ini adalah metode yang digunakan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk menyebarkan pengaruh, ideologi, dan mewujudkan kepentingan masing-masing tanpa harus saling berhadapan secara langsung. Sedangkan pada Perang Dunia Pertama dan Kedua, terjadi perang konfrontasi langsung dengan penggunaan kekuatan militer, yang menimbulkan rasa tidak aman di dunia pada saat itu serta mempengaruhi negara-negara lain.

Seiring berjalannya waktu, dinamika keamanan menjadi semakin kompleks, di mana banyak aktor non-negara dapat menjadi ancaman di masa depan (Sari, 2019:31). Dalam model keamanan ini, aktor-aktor kuat sering melakukan operasi militer terhadap aktor-aktor besar untuk mempertahankan pengaruhnya terhadap negara-negara saingan. Interaksi strategis dengan demikian diklasifikasikan dalam studi konflik dalam hubungan internasional, di mana aktor yang kuat hampir selalu menang dalam setiap konflik (Manurung, 2017:37).

Setiap negara membutuhkan kekuatan dan juga keamanan dimana negara harus memiliki alat-alat kekuatan yang baik seperti kekuatan militer dan senjata. Strategi yang muncul saat ini bukan hanya penggunaan kekuatan fisik atau kekuatan

militer, tetapi kombinasi kekuatan militer dan non militer, atau bahkan penyatuan kekuatan non militer. Perang tidak hanya didasarkan pada kekuatan militer, tetapi mencakup beberapa aspek ekonomi, sipil, politik, dan informasi. Penggunaan metode peperangan ini dapat disesuaikan dengan kemampuan negara itu sendiri, kelemahan aktor yang dituju atau ditargetkan.

Sejarah memberi tahu kita bahwa pasca Perang Dingin 1991, interaksi lintas sektor dalam pembentukan tatanan global terjadi lebih cepat. Perkembangan aktor, kelompok, dan individu negara juga semakin beragam. Misalnya, pola ancaman adalah bentuk ancaman yang menggunakan kekuatan militer, seperti senjata, dan dilakukan secara terorganisir dengan baik. Tipe ini dianggap mampu mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keamanan seluruh bangsa. Ada pula ancaman nonmiliter, yaitu jenis yang tidak memiliki ciri dan bentuk fisik, atau tidak terlihat secara kasat mata. Jenis ancaman ini sama berbahayanya dengan jenis sebelumnya. Dimana terdapat beberapa hal yang dapat menjadi sasaran dari setiap ancaman yang pernah terjadi, seperti ancaman terhadap negara, pemerintah, masyarakat, individu dan ancaman terhadap wilayah. Beberapa bahkan sampai menyewa apa yang disebut perusahaan militer swasta untuk menangani ancaman atau konflik yang sedang berlangsung.

Dari koperasi militer swasta, kita dapat mengenalnya sebagai Private Military Company (PMC). Perusahaan militer swasta (PMC) adalah perusahaan militer swasta yang merupakan model pengembangan untuk modernisasi militer swasta yang menyediakan jasa dan keahlian yang berhubungan dengan bidang militer atau bidang sejenisnya. PMC juga dikenal sebagai Perusahaan Militer

Swasta, Perusahaan Militer Swasta, Penyedia Layanan Militer dan Industri Militer Swasta. Mereka biasanya digunakan dalam situasi konflik intensitas rendah, di mana penggunaan angkatan bersenjata penuh dapat merugikan secara ekonomi, diplomatik, atau politik. Perusahaan militer swasta dapat bermitra dengan negara-negara untuk menyediakan kegiatan pelatihan terkait militer dan pertahanan. Meskipun kontroversial, penggunaan PMC terus berlanjut dan dianggap sebagai alternatif yang lebih hemat biaya daripada memiliki angkatan bersenjata penuh. Layanan yang diberikan oleh PMC secara garis besar dapat dilihat menjadi empat bagian (Petersohn, 2008), yaitu Jasa kombat, Jasa Konsultasi Keamanan, Jasa dukungan logistic, dan Private Security Company (PSC).

Keterlibatan ini kemudian menjadi titik awal dasar mengapa negara menggunakan PMC dalam operasi militernya dibanding tentara konvensional (reguler). Tidak menguatnya aturan hukuman internasional secara pasti berakibat pada penggunaan tentara swasta yang bukan saja di Amerika Serikat menggunakan tentara bayaran atau tentara swasta melainkan juga dapat dijumpai di negara lain, seperti Inggris, Afghanistan, Afrika Selatan dan Rusia. Misalnya di Inggris ada Aegis Defense Services yang terlibat dengan NGO, unit pemerintahan sektor diplomatik, industri minyak dan gas pertambangan. Operasi ini dikerahkan pada perlindungan restrukturisasi Amerika Serikat di Irak tahun 2011 dan juga Kedutaan Besar Amerika Serikat di Afghanistan. Mereka mendapatkan nilai kontrak 497 juta dolar untuk melindungi Kedutaan Besar AS yang terletak di Kabul. (Reichborn & Cullen, 2016)

Penggunaan PMC pertama kali terungkap dalam pembunuhan empat tentara Amerika (AS) selama operasi militer di Fallujah, Irak, dengan cara digantung dan dipublikasikan oleh media internasional partisan. AS menggunakannya sebagai alat kebijakan luar negeri. Strategi ini pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Amerika (AS) sebagai "pre-emptive strike" ketika menginvasi Afganistan pada tahun 2001 dan Irak pada tahun 2003. AS mengadopsinya sebagai konsekuensi dari World Trade Center (WTC) 9/11 tragedi Pada tahun 2001.

Munculnya Private Military Company (PMC) telah membawa beberapa perubahan, di antara perubahan perkembangan modernisasi, perubahan tersebut mempengaruhi model struktural peperangan dari "klasik" menjadi "modernis", seperti masuknya PMC, mereka menyediakan dengan berbagai jasa bantuan militer dalam bidang telekomunikasi. Setelah serangan di Gedung Putih pada 11 September 2001, tindakan mereka diperhatikan dengan kepekaan doktrinal yang meningkat. Partisipasi tersebut kemudian menjadi asumsi dasar mengapa negara menggunakan PMC dalam operasi militernya dibandingkan dengan tentara reguler (konvensional). Menurut Arbi Sanit, Modernisasi adalah terjadinya perubahan dalam setiap tingkat kehidupan individu yang awalnya tradisional menjadi menuju kehidupan yang lebih modern atau maju.

Private Military Company (PMC) sering dianggap sebagai alat dari negara sehingga keberadaannya kerap dianggap sebagai secondary international actors akan tetapi PMC memiliki kapasitas yang kuat dalam mempengaruhi pemahaman

mengenai diskursus keamanan yang dianggap sebagai epistemic power (Leander, 2005, 825).

Oleh karena itu, tidak salah jika Rusia juga menjadi negara yang memiliki PMC yang dinamai Wagner. Wagner Private Military Company (Wagner PMC), Dengan tersebarnya berita tentang grup Wagner di surat kabar, jurnal dan media sosial, kita mendapatkan akses dan informasi tentang seputar tentara bayaran bernama Wagner, yang diklaim oleh seorang pengusaha Rusia dan sekutu Vladimir Putin, Yevgeny Prigozhin sebagai pendirinya. Yang dimana dapat kita ketahui grup Wagner ini adalah grup tentara bayangan yang menjadi bayangan orang yang bekerja untuk Rusia.

Pada Maret 2014 terjadi tindakan separatis di Ukraina Timur di kota-kota seperti Donetsk, Luhansk, dan Harkov. Tindakan separatis tersebut menyerukan ketidakpuasannya akan kepemimpinan baru. Semua tindakan tersebut disertai dengan kampanye diplomatik, ekonomi, dan keterlibatan media yang kuat dan intensif. Tindakan tersebut didukung oleh unit-unit militer Rusia yang besar yang berbaris di sepanjang perbatasan dengan Ukraina (Catalin, 2019:11).

Sejak Mei 2014, Rusia telah menggunakan aktor-aktor non-negara di Ukraina Timur untuk bertindak sebagai proksi dalam perang. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan uang dan peralatan tempur hingga Rusia telah mampu mengendalikan wilayah Donetsk dan Luhansk. Tidak lama setelah itu, kelompok separatis menyatakan kemerdekaan mereka. Tidak cukup sampai disitu, Rusia juga melakukan serangan cyber terhadap Ukraina dimana pada tahun 2014 terjadi penyadapan atau penyerangan telepon anggota parlemen, selain itu juga

menyerang beberapa website pemerintahan resmi Ukraina dan serangan tersebut mempengaruhi pemilihan presiden. Kemudian, pada tahun 2015 terjadi serangan cyber ke perusahaan distribusi listrik Ukraina.

Dengan keterlibatan media, media – media Rusia menetapkan aturan editorial yang bertujuan untuk memutarbalikkan fakta mengenai aneksasi Krimea dan propaganda serta keterlibatan perusahaan tentara bayaran. Selain itu juga, membatasi situs – situs yang dianggap menentang pemerintahan Rusia saat itu. Secara ekonomi, adanya hybrid war ini dapat menguntungkan Rusia. Dimana dalam distribusi energi dari Rusia dialirkan melalui jalur pipa yang melewati Ukraina menjadi salah satu pendapatan yang didapat Rusia. Sehingga, apabila terjadi ketergantungan energi akan menyebabkan negara – negara lain mengikuti aturan yang dibuat oleh Rusia. Sehingga, Rusia memiliki posisi yang cukup strategis di Eropa.

Sebelum serangan operasi militer khusus pada tahun 2022, Rusia telah melakukan upaya aneksasi terhadap Crimea pada tahun 2014. Dengan menurunkan 40.000 pasukan militer Rusia dan memberikan dukungan terhadap pemberontak pro-Rusia di Donetsk dan Luhansk yang pada saat itu mendeklarasikan kemerdekaan dari Ukraina (Sullivan, 2022)

Rusia melakukan tindakan ofensif secara besar-besaran ke Ukraina pada 24 Februari 2022 saat Presiden Rusia, Vladimir Putin, melakukan “operasi militer khusus” ke Ukraina dengan tujuan mendemilitarisasi dan mendenazifikasi Ukraina. Langkah tersebut kemudian dianggap sebagai invasi Rusia ke Ukraina oleh komunitas internasional karena telah terjadi eskalasi serangan ofensif.

Rusia secara aktif menggunakan Private Military Company (PMC) sejak aneksasi Crimea pada tahun 2014. Salah satu PMC yang menjadi perpanjangan tangan Rusia dalam melancarkan aksi militer bayangannya di luar teritori Rusia adalah Wagner Group. Pihak pemerintah Rusia tidak mengakui adanya hubungan atau mengenali eksistensi Wagner Group. Organisasi the Carnegie Endowment for International Peace melaporkan bahwa Direktorat Utama Intelijen Rusia (GRU) melakukan pengawasan terhadap pasukan Wagner Group, memberikan mereka dukungan pelatihan di sebuah pangkalan militer di bagian selatan Rusia, dan menerjunkan personil Wagner Group ke Syria sebelum melakukan intervensi ke Crimea (Clay, 2022).

Meski pemerintah Rusia belum mengakui adanya keterlibatan dengan Grup Wagner, pemodal Rusia yang juga pendiri Grup Wagner, Yevgeny Prigozhin, aktif membuat pernyataan melalui akun elektronik. kredensial resminya tentang pencapaian dan sikap Grup Wagner selama dia bekerja. Selama konflik Rusia-Ukraina sampai pada tahun 2022. Karyawan Grup Wagner juga mudah dikenali selama operasi lapangan berkat lambang militer dan lambang Grup Wagner mereka (Vox, 2023). Hubungan antara Grup Wagner dan pemerintah Rusia semakin terlihat seiring dengan sikap menonjol Grup Wagner yang semakin menunjukkan eksistensinya.

Isu ini kerap muncul atas penggunaan Wagner PMC, oleh karena itu PMC sendiri menggunakan kapabilitas intelijen mereka untuk melakukan pitching dengan negara agar dapat melakukan kontrak operasi militer (Braun & Guston, 2003, 303-304).

Keterlibatan Wagner PMC dalam konflik di Ukraina meningkatkan ketegangan antara Rusia dan Ukraina dan menjadi salah satu faktor pendorong konflik kedua negara. Keterlibatan Wagner PMC dalam konflik Ukraina menciptakan ketegangan antara Rusia dan Ukraina, dan antara Rusia dan beberapa negara Barat yang mengkritik keterlibatan perusahaan swasta dalam konflik tersebut.

keterlibatan ini kemudian menjadi titik tolak dasar mengapa negara-negara menggunakan Private Military Company dalam operasi militernya melawan militer konvensional (reguler). Kurangnya penguatan aturan pidana internasional tentu saja menyebabkan penggunaan tentara swasta, yang tidak hanya di Amerika Serikat mempekerjakan tentara bayaran atau tentara swasta, tetapi juga dapat ditemukan di negara-negara lain, seperti Inggris, Afghanistan , Afrika Selatan dan Rusia. Misalnya di Inggris ada Aegis Defense Services yang terlibat dengan NGo, unit pemerintahan sektor diplomatik, industri minyak dan gas pertambangan. Operasi ini dikerahkan pada perlindungan restrukturisasi Amerika Serikat di Irak tahun 2011 dan juga Kedutaan Besar Amerika Serikat di Afghanistan. Mereka mendapatkan kontrak senilai \$497 juta dolar untuk melindungi kedutaan AS di Kabul. (Reichborn & Cullen, 2016)

Penggunaan PMC pertama kali terungkap dalam pembunuhan empat tentara Amerika (AS) selama operasi militer di Fallujah, Irak, dengan cara digantung dan dipublikasikan oleh media internasional partisan. AS menggunakannya sebagai alat kebijakan luar negeri. Strategi ini pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Amerika (AS) sebagai "pre-emptive strike" ketika

menginvasi Afganistan pada tahun 2001 dan Irak pada tahun 2003. AS mengadopsinya sebagai konsekuensi dari World Trade Center (WTC) 9/11 tragedi Pada tahun 2001.

Munculnya Private Military Company (PMC) telah membawa beberapa perubahan, di antara perubahan perkembangan modernisasi, perubahan tersebut mempengaruhi model struktural peperangan dari “klasik” menjadi “modernis”, seperti masuknya PMC, mereka menyediakan dengan berbagai jasa bantuan militer dalam bidang telekomunikasi. Setelah serangan di Gedung Putih pada 11 September 2001, tindakan mereka diperhatikan dengan kepekaan doktrinal yang meningkat. Partisipasi tersebut kemudian menjadi asumsi dasar mengapa negara menggunakan PMC dalam operasi militernya dibandingkan dengan tentara reguler (konvensional). Menurut Arbi Sanit, Modernisasi adalah terjadinya perubahan dalam setiap tingkat kehidupan individu yang awalnya tradisional menjadi menuju kehidupan yang lebih modern atau maju.

Private Military Company (PMC) sering dilihat atau dianggap sebagai alat negara, sehingga keberadaannya sering dilihat sebagai aktor internasional sekunder, tetapi PMC memiliki potensi untuk memberikan dampak yang kuat pada pemahaman. Mengetahui tentang wacana keamanan dianggap sebagai kekuatan pengetahuan (Leander, 2005, 825).

Oleh karena itu, tidak salah jika Rusia juga menjadi negara yang memiliki PMC yang dinamai Wagner. Wagner Private Military Company (Wagner PMC), Dengan tersebarnya berita tentang grup Wagner di surat kabar, jurnal dan media sosial, kita mendapatkan akses dan informasi tentang seputar tentara bayaran

bernama Wagner, yang diklaim oleh seorang pengusaha Rusia dan sekutu Vladimir Putin, Yevgeny Prigozhin sebagai pendirinya. Yang dimana dapat kita ketahui grup Wagner ini adalah grup tentara bayangan yang menjadi bayangan orang yang bekerja untuk Rusia.

Pada Maret 2014, aksi separatist terjadi di timur Ukraina di kota-kota seperti Donetsk, Luhansk, dan Harkov. Tindakan pemisahan diri mengungkapkan ketidakpuasan dengan kepemimpinan baru. Semua tindakan ini disertai dengan kampanye keterlibatan diplomatik, ekonomi, dan media yang kuat dan intensif. Tindakan ini didukung oleh unit militer besar Rusia yang berbaris di sepanjang perbatasan dengan Ukraina (Catalin, 2019:11).

Sejak Mei 2014, Rusia telah menggunakan aktor non-negara di timur Ukraina untuk memainkan peran proksi dalam perang. Hal itu dilakukan dengan memberikan uang dan peralatan tempur hingga Rusia dapat menguasai wilayah Donetsk dan Lugansk. Segera setelah itu, kelompok separatist mendeklarasikan kemerdekaan mereka. Tidak berhenti di situ, Rusia juga melakukan serangan siber terhadap Ukraina, di mana pada tahun 2014 terjadi kasus penyadapan atau peretasan ke telepon anggota parlemen, selain serangan terhadap sejumlah situs website. Pejabat pemerintah Ukraina dan serangan itu memengaruhi pemilihan presiden. Kemudian, pada 2015, terjadi serangan dunia cyber terhadap perusahaan distribusi listrik Ukraina. Dengan keterlibatan media, media Rusia menetapkan aturan editorial yang bertujuan memutarbalikkan fakta tentang aneksasi Krimea dan propaganda serta keterlibatan perusahaan tentara bayaran. Selain itu, membatasi situs website yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Rusia saat itu. Secara

ekonomi, adanya hybrid war ini bisa menguntungkan Rusia. Di mana energi Rusia didistribusikan melewati jaringan pipa yang melewati Ukraina, yang merupakan salah satu pendapatan yang didapat Rusia. Jadi, jika ada ketergantungan energi, negara lain harus mengikuti aturan yang ditetapkan Rusia. Dengan demikian, Rusia menempati posisi strategis di Eropa. Sebelum gempuran operasi militer khusus pada 2022, Rusia berupaya mencaplok Krimea pada 2014. Dengan menurunkan 40.000 pasukan militer Rusia dan memberikan dukungan terhadap pemberontak pro-Rusia di Donetsk dan Luhansk yang pada saat itu mendeklarasikan kemerdekaan dari Ukraina (Sullivan, 2022)

Rusia melakukan tindakan ofensif secara besar-besaran ke Ukraina pada 24 Februari 2022 saat Presiden Rusia, Vladimir Putin, melakukan “operasi militer khusus” ke Ukraina dengan tujuan mendemilitarisasi dan mendenazifikasi Ukraina. Langkah tersebut kemudian dianggap sebagai invasi Rusia ke Ukraina oleh komunitas internasional karena telah terjadi eskalasi serangan ofensif.

Rusia secara aktif menggunakan Private Military Company (PMC) sejak aneksasi Crimea pada tahun 2014. Salah satu PMC yang menjadi perpanjangan tangan Rusia dalam melancarkan aksi militer bayangannya di luar teritori Rusia adalah Wagner Group. Pihak pemerintah Rusia tidak mengakui adanya hubungan atau mengenali eksistensi Wagner Group. Organisasi the Carnegie Endowment for International Peace melaporkan bahwa Direktorat Intelijen Utama (GRU) Rusia mengawasi pasukan Grup Wagner, memberi mereka dukungan pelatihan di pangkalan militer di Rusia selatan, dan mengerahkan karyawan Grup Wagner di Suriah sebelum intervensi di Krimea (Clay, 2022).

Meski pemerintah Rusia belum mengakui adanya keterlibatan dengan Grup Wagner, pemodal Rusia yang juga pendiri Grup Wagner, Yevgeny Prigozhin, aktif membuat pernyataan melalui akun elektronik. kredensial resminya tentang pencapaian dan sikap Grup Wagner selama dia bekerja. Selama konflik Rusia-Ukraina sampai pada tahun 2022. Karyawan Grup Wagner juga mudah dikenali selama operasi lapangan berkat lambang militer dan lambang Grup Wagner mereka (Vox, 2023). Hubungan antara Grup Wagner dan pemerintah Rusia semakin terlihat seiring dengan sikap menonjol Grup Wagner yang semakin menunjukkan eksistensinya.

Isu ini kerap muncul atas penggunaan Wagner PMC, oleh karena itu PMC sendiri menggunakan kapabilitas intelijen mereka untuk melakukan pitching dengan negara agar dapat melakukan kontrak operasi militer (Braun & Guston, 2003, 303-304).

Keterlibatan Wagner PMC dalam konflik di Ukraina meningkatkan ketegangan antara Rusia dan Ukraina dan menjadi salah satu faktor pendorong konflik kedua negara. Keterlibatan Wagner PMC dalam konflik Ukraina menciptakan ketegangan antara Rusia dan Ukraina, dan antara Rusia dan beberapa negara Barat yang mengkritik keterlibatan perusahaan swasta dalam konflik tersebut.

Wagner PMC sering digambarkan sebagai kelompok tentara bayaran sebagai tentara bayangan yang digunakan oleh Rusia untuk melakukan operasi militer rahasia di luar negeri. Anggotanya dilaporkan terdiri dari mantan tentara dan agen keamanan Rusia yang dipekerjakan oleh Prigozhin di bawah kontrak militer

swasta. Namun, karena kerahasiaannya, sulit untuk mengatakan siapa anggota Wagner PMC dan bagaimana organisasinya (Iwan Santoso, 2023)

Dalam kasus konflik Rusia-Ukraina, Wagner PMC diyakini telah membantu pihak pro-Rusia dalam konflik tersebut, termasuk memberikan dukungan militer, pelatihan militer, dan logistik. Beberapa laporan juga menunjukkan bahwa anggota Wagner PMC telah terlibat dalam pertempuran di Ukraina dan telah memakan korban jiwa selama konflik tersebut. Pada tahun 2020, sebuah laporan dari The New York Times mengungkapkan bahwa sekitar 2.000 anggota Wagner PMC telah dikirim ke Ukraina untuk mendukung pemberontak pro-Rusia. Namun, jumlah ini sulit untuk diverifikasi secara resmi (Christy Cooney & Rebecca Seales, 2023) Jadi, untuk menghindari skenario ini dan melakukan perang hibrida melawan Ukraina, Rusia harus bertindak dengan mengintervensi Ukraina. Dengan bantuan Wagner PMC-nya, Rusia mencoba menggoyahkan politik Ukraina dan meninggalkan arah pro-Baratnya melalui manipulasi politik.

Namun keterlibatan Wagner PMC yang ikut dalam konflik Rusia-Ukraina, karena melihat Ukraina terus mengambil langkah untuk bergabung dengan Uni Eropa atau NATO yang didominasi oleh Amerika dan Eropa Barat, jelas pengaruhnya di Ukraina dan kehadiran armadanya di semenanjung Krimea terancam. Dengan bantuan Wagner PMC-nya, Rusia mencoba menggoyahkan politik Ukraina dan meninggalkan arah pro-Baratnya melalui manipulasi politik.

Itulah sebabnya Putin, sebagai otoritas tertinggi di Rusia, di mana Putin melihat perluasan NATO sebagai ancaman eksistensial dan akses Ukraina ke aliansi militer Barat sebagai tindakan bermusuhan, karenanya tentara swasta

Wagner PMC di militer. operasi mengacu pada dukungan Rusia. Tetapi masalahnya adalah menurut konstitusi 1993, Putin harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Federasi Rusia dari majelis rendah parlemen Rusia untuk memerintahkan pengerahan pasukan Rusia ke luar negeri atau untuk mengesahkan serangan udara di Ukraina.

Setelah Presiden Vladimir Putin menyatakan perang terhadap Ukraina, Rusia menginvasi Ukraina pada Kamis, 2 Februari 2022. Konflik antara Rusia dan Ukraina bukanlah konflik baru, melainkan konflik yang terjadi pada tahun 2014, dimana kedua negara pernah memperebutkan wilayah Ukraina. Ukraina. di semenanjung Krimea, yang berakhir dengan aneksasi wilayah ini oleh Rusia. Tindakan Rusia menciptakan konflik kekerasan antar negara. Konflik ini meningkat ketika sebuah badan intelijen AS melaporkan bahwa Rusia mungkin merencanakan serangan ke Ukraina pada awal tahun 2022. Rusia langsung menolak tuduhan tersebut dan menganggapnya sebagai provokasi NATO terhadap Rusia.

Berdasarkan upaya Rusia melawan Ukraina, generasi baru perang terwakili saat ini. Akibatnya, tindakan Rusia menyebabkan Ukraina menghadapi berbagai masalah internal dan eksternal yang akan muncul pada tahun 2022. Masalah eksternal Ukraina adalah perang hibrida Rusia. Sebab bagi Rusia, Ukraina merupakan negara yang cocok untuk menguji metode perang hibrida dan peralatan militer. Perang hybrid merupakan upaya untuk memutarbalikan keadaan yang menciptakan situasi antara perang dan damai (Reichborn & Cullen, 2016:2).

Dalam penelitian ini disertakan beberapa jurnal dan Usulan Penelitian yang serupa, yaitu:

1. Jurnal yang berjudul ‘‘RESISTENSI REPUBLIK FEDERASI RUSIA DALAM MENGAMANKAN KEPENTINGANNYA DI REPUBLIK UKRAINA’’ yang ditulis oleh Muchammad Farid, Jenny Laurens, Arfana Ibrahim. Penelitian ini membahas tentang Pasca bubarnya Uni Soviet di kancah perpolitikan internasional, Amerika Serikat menyanggah predikat sebagai negara Super Power di dunia. Perkembangan yang sangat pesat dan maju yang dialami Republik Federasi Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin mampu menyelaraskan diri dan menjadi pesaing utama Amerika Serikat di segala bidang.
2. Jurnal yang berjudul "INTERVENSI MILITER RUSIA TERHADAP REPUBLIK OTONOMI KRIMEA, UKRAINA PERIODE 2013-2022 SEBAGAI PELANGGARAN HUKUM INTERNASIONAL’’ Journal of International Relations, vol. 1105-1121, Dec. Penelitian ini membahas serangan militer Rusia terhadap Ukraina pada Februari 2022 memicu dan konflik lama yang dimulai pada bulan yang sama pada 2014.
3. Jurnal yang berjudul «Russia Sovereignty and Regional Security: The Asymmetric Conflict of the Russian Federation Military in Ukraine » yang ditulis oleh Hendra Manurung pada tahun 2017. Peneliti membahas mengenai bagaimana Rusia sebagai aktor global menerapkan kebijakan tegas terhadap Ukraina. Untuk mencapai tujuan politik dalam negeri, Rusia menggunakan kombinasi operasi militer dan non-militer.
4. Jurnal yang berjudul ‘‘Proses Integrasi Nasional Dalam Pembangunan Bangsa Ukraina: Merespon Momentum Euromaidan’’ Journal of

International Relations, vol. 8, no. 3, pp. 564-574, Jul. 2022. Yang ditulis oleh A. H. Tejasuar, and M. Hanura. Intervensi asing yang terjadi pasca-Euromaidan mengancam keamanan bangsa. Dinamika ini akan mempengaruhi masa depan Ukraina di masa depan, terkait dengan runtuhnya garis polarisasi, juga terkait dengan posisi Ukraina dalam sistem politik internasional.

5. Jurnal yang berjudul “Bingkai Identitas dalam Konflik Geopolitik: Intervensi Militer Rusia di Ukraina” yang ditulis oleh Rizky Widiasta tahun 2018. Penelitian tersebut membahas intervensi Rusia terhadap Ukraina yang dimana Rusia melakukan hal tersebut dengan dalih identitas dan sejarah yang terjadi diantara kedua negara tersebut.

Dalam penelitian ini saya dapat membahas tentang keterkaitan Wagner Private Military Company dalam konflik Rusia-Ukraina. Sehingga, melihat bagaimana Rusia sebagai negara pecahan Uni Soviet tetap ingin memiliki pengaruh khususnya di negara – negara pecahan Uni Soviet salah satunya Ukraina dengan menggunakan Wagner Private Military Company sebagai tentara bayaran.

Adapun mata kuliah yang dipelajari oleh peneliti dari Program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Informatika Indonesia yang telah membantu peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah:

1. Studi Keamanan Internasional

Mata kuliah Studi Keamanan Internasional memberikan pemahaman tentang bagaimana situasi keamanan yang ada pada setiap negara. Studi Keamanan

Internasional juga merupakan dasar pemikiran dalam mengkaji sengketa dan konflik dalam keamanan Internasional.

2. Hukum Internasional

Mata Kuliah Hukum Internasional membantu peneliti dalam mempelajari tentang sengketa internasional menurut hukum internasional dan bagaimana cara penyelesaian sengketa dapat membantu membantu dalam mengurangi konflik yang terjadi.

3. Diplomasi dan Negoisasi

Mata Kuliah Diplomasi membantu peneliti mendapatkan pandangan akan upaya suatu negara untuk mendapatkan kepentingan nasional apalagi yang berkaitan dengan perbatasan wilayah suatu negara.

Berlandaskan uraian pada latar belakang yang sudah penulis jabarkan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KETERLIBATAN WAGNER PRIVATE MILITARY COMPANY DALAM PERANG RUSIA-UKRAINA”**

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

“Bagaimana keterlibatan Wagner Private Military Company dalam perang Rusia-Ukraina?”

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Berdasarkan rumusan masalah mayor di atas, peneliti kemudian menurunkan ke dalam beberapa rumusan masalah minor, diantaranya:

1. Bagaimana hubungan Rusia dan Ukraina?
2. Bagaimana penyebab dan keberlangsungan konflik Rusia-Ukraina?
3. Bagaimana sejarah dan keterlibatan Wagner Private Military Company dengan Rusia selama konflik Rusia-Ukraina?
4. Bagaimana dampak keterlibatan Wagner Private Military Company dalam konflik Rusia-Ukraina?
5. Bagaimana kepentingan nasional Rusia di Ukraina melalui Wagner Private Military Company?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian, agar penelitian ini tidak terlalu jauh, melebar, serta luas dalam pembahasannya, maka dari itu, peneliti telah memberikan pembatasan masalah dalam penelitian ini. Peneliti membatasi cakupan topik penelitian tentang keterlibatan Wagner Private Military Company dalam perang Rusia Ukraina.

Dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti juga membatasi rentang waktu dari tahun 2014 hingga 2022. Indikasi awal bahwa *Wagner Private Military Company* terlibat dalam konflik di wilayah timur Ukraina sejak tahun 2014. Keberadaan dan keterlibatan Wagner PMC di Ukraina dimulai pada pertengahan 2014. Mereka dikabarkan berperan sebagai pasukan bayaran yang bekerja secara rahasia dengan dukungan dan bimbingan dari pemerintah Rusia. Aktivitas mereka meliputi pengiriman pasukan dan personel sebagai

pasukan tempur, penasihat militer, pelatihan militer atau pelatihan bagi pasukan separatis, dan dukungan logistik kepada pemberontak separatis yang mendukung Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk di Ukraina timur. ketika mereka terlibat dalam mendukung separatis pro-Rusia di wilayah timur Ukraina, terutama di wilayah Donetsk dan Luhansk.

1.4 Maksud dan Tujuan Peneliti

1.4.1 Maksud penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman secara deskriptif dan memperoleh data serta memperdalam pengetahuan penulis tentang keterlibatan tentara bayaran dalam konflik bersenjata dalam perang Rusia – Ukraina, melihat sejauh mana proses pengambilan kebijakan Rusia mengirimkan tentara bayaran di Ukraina. Atau sejauh mana keterlibatan Wagner dalam proses pengambilan kebijakan melakukan invasi militer di Ukraina.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Hubungan Rusia dan Ukraina.
2. Untuk mengetahui penyebab dan keberlangsungan konflik Rusia-Ukraina.
3. Untuk mengetahui sejarah dan keterlibatan Wagner Private Military Company dengan Rusia selama konflik Rusia-Ukraina.
4. Untuk mengetahui dampak keterlibatan Wagner Private Military Company dalam konflik Rusia-Ukraina.
5. Untuk mengetahui kepentingan nasional Rusia di Ukraina melalui Wagner Private Military Company.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian terdiri dari kegunaan teoritis yang berdasarkan dari pertimbangan kontekstual dan konseptual serta kegunaan praktis untuk perbaikan bagi lembaga yang bersangkutan. Kegunaan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut. Adapun Kegunaan dari penelitian ini yakni:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional dan menjadi sumber atau referensi untuk pengetahuan mengenai keterlibatan Wagner Private Military Company dalam konflik Rusia Ukraina.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Untuk Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti mengenai keterlibatan tentara bayaran Dalam Konflik Rusia -Ukraina. Penelitian ini berguna bagi peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana S-1 (Strata Satu) pada Progam Studi Hubungan Internasional Universitas Komputer Indonesia. Dan juga sebagai bahan pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti, serta menambah tingkat analisis peneliti

2. Untuk Akademik

Penelitian ini memiliki manfaat untuk membantu memperluas kajian hubungan internasional terutama pada analisis konflik yang terjadi khususnya pada konflik Ukraina-Rusia yang dimana pada konflik ini adanya keterlibatan sebuah tentara bayaran bernama *Wagner Private Military*

Company dan diharapkan dapat menjadi referensi serta bahan bacaan atau bahan ajar bagi mahasiswa Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) secara umum dan mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional untuk penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian pada kajian yang sama.

3. Untuk Masyarakat

Penelitian ini juga berguna bagi masyarakat umum dan diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca sebagai pengetahuan untuk mengetahui mengenai apa itu *Wagner Private Military Company* serta bagaimana keterlibatannya dalam konflik Rusia – Ukraina.